

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GRADUASI DALAM MEWUJUDKAN
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)
(Studi Kasus Pada PKH di Desa Gedung Jaya, Kecamatan Negara Batin,
Kabupaten Waykanan Tahun 2021)**

(Skripsi)

Oleh

Tsmioni Rahmawati
NPM 1716041087



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GRADUASI DALAM MEWUJUDKAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)* (Studi Kasus Pada PKH di Desa Gedung Jaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waykanan Tahun 2021)

Oleh

ISMIONI RAHMAWATI

Upaya penanggulangan masalah kemiskinan melalui Program Perlindungan Sosial salah satunya melalui Program Keluarga Harapan (PKH). PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam DTKS. Sampai dengan saat ini PKH telah memasuki gelombang generasi keempat yaitu graduasi peserta PKH. Kebijakan graduasi diharapkan dapat mewujudkan tujuan-tujuan SDGs, khususnya pada tujuan pertama dan keempatnya yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan dan menjamin kualitas pendidikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan graduasi dan peran kebijakan graduasi dalam mewujudkan SDGs di Desa Gedung Jaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, dengan menggunakan indikator keberhasilan implementasi kebijakan (input, agen pelaksana, hasil) menurut Anne L. Scheneider (2016), serta menggunakan indikator perubahan ekonomi eks KPM PKH dan angka kelulusan sekolah menengah bagi anak laki-laki dan perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan berbasis studi kasus. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan graduasi di Desa Gedung Jaya telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif dalam perubahan ekonomi sesuai dengan tujuan pertama SDGs, terutama pada peningkatan pendapatan eks Keluarga Penerima Manfaat melalui usaha yang dijalankannya. Namun, baik pelaksanaan PKH maupun graduasi masih gagal dalam mewujudkan tujuan keempat SDGs, sebab angka putus sekolah anak PKH masih terbilang cukup tinggi.

Kata Kunci: Kemiskinan, Program Keluarga Harapan (PKH), Graduasi, SDGs

ABSTRACT

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GRADUASI DALAM MEWUJUDKAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)* (Studi Kasus Pada PKH di Desa Gedung Jaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waykanan Tahun 2021)

By:

ISMIONI RAHMAWATI

Efforts to overcome poverty through Social Protection Programs, one of which is through the Conditional Cash Transfer (CCT). CCT is a program of providing conditional social assistance to poor and vulnerable families registered in the DTKS. Until now CCT has entered the fourth generation wave namely participant graduation. The graduation policy is expected to be able to realize the goals of the SDGs, especially in the first and fourth objectives, namely ending all forms of poverty and ensuring the quality of education.

This study aims to determine the implementation of graduation policies and the role of graduation policies in realizing SDGs in Gedung Jaya Village, Negara Batin District, Way Kanan Regency, using indicators of successful policy implementation (inputs, implementing agents, results) according to Anne L. Scheneider (2016) , as well as using indicators of economic change in former KPM and high school graduation rates for boys and girls. This research uses a qualitative approach based on case studies. The results of the study indicate that the implementation of the graduation policy in Gedung Jaya Village has been going well and has had a positive impact on economic change in accordance with the first objective of the SDGs, especially in increasing the income of ex-beneficiary family through the business they run. However, both the implementation of CCT and graduation still fail to realize the goals of the four SDGs, because the dropout rate for CCT children is still quite high.

Keywords: Poverty, Conditional Cash Transfer (CCT), Graduation, SDGs

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GRADUASI DALAM MEWUJUDKAN
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)
(Studi Kasus Pada PKH di Desa Gedung Jaya, Kecamatan Negara Batin,
Kabupaten Waykanan Tahun 2021)**

Oleh

Ismioni Rahmawati

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA

Pada

Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GRADUASI
DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS (SDGs)
(Studi Kasus Pada PKH di Desa Gedung Jaya,
Kecamatan Negara Batin, Kabupaten
Waykanan Tahun 2021)**

Nama Mahasiswa : **Ismioni Rahmawati**

Noomor Pokok Mahasiswa : **1716041087**

Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**




Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D.
NIP 19850620 200812 2 001


Devi Yulianti S.A.N., M.A.
NIP. 19850705 200812 2 004

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara


Meiliyana, S.I.P., M.A.
NIP. 19740520 200112 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

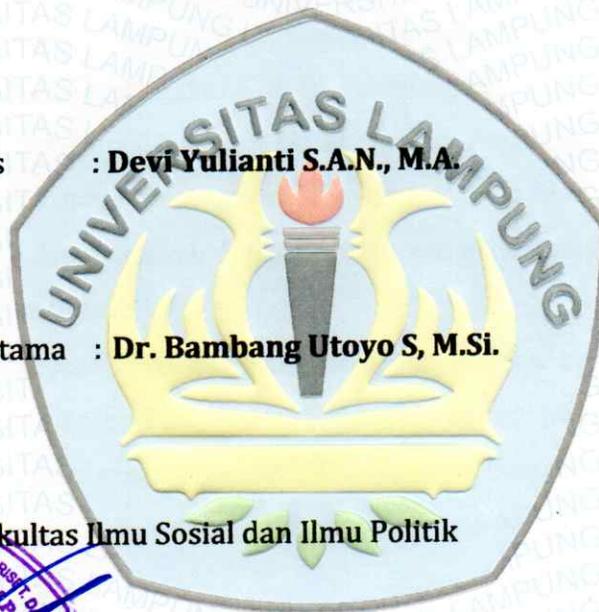
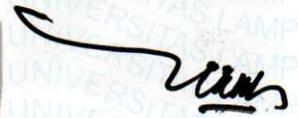
Ketua : Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D.



Sekretaris : Devi Yulianti S.A.N., M.A.



Penguji Utama : Dr. Bambang Utoyo S, M.Si.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 02 November 2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

. Bandar Lampung, 2 November 2021
Yang membuat pernyataan,



Ismioni Rahmawati
NPM. 1716041087

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Ismioni Rahmawati, lahir di Way Kanan pada tanggal 31 Oktober 1999. Penulis merupakan anak keempat dari enam bersaudara, dari pasangan Bapak Sutrimo dan Ibu Nur Hayati. Penulis memulai pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri 1 Gedung Jaya yang diselesaikan pada tahun 2011. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Negara Batin yang diselesaikan pada tahun 2014, dan meneruskan pendidikan ke Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) 1 Swadhipa Natar yang diselesaikan pada tahun 2017.

Pada tahun 2017 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur Penerimaan Mahasiswa Perluasan Akses Pendidikan (PMPAP). Pengalaman organisasi pada jenjang Perguruan Tinggi, penulis tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA) sebagai anggota Kajian Pengembangan Keilmuan (KPK).

Pada Bulan Januari-Februari tahun 2020 penulis melaksanakan KKN di Desa Teba Pering Raya, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat selama 40 hari. Pada Bulan Juli-Agustus tahun 2020 penulis melaksanakan kegiatan PKL di kantor KPU Provinsi Lampung selama 30 hari. Setelah itu penulis mengikuti kegiatan Program Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara-Sistem Alih Kredit dengan Teknologi Informasi (PERMATA-SAKTI) periode 2020/2021 di Universitas Jember, Universitas Negeri Malang, dan Universitas Negeri Semarang selama satu semester masa perkuliahan.

MOTTO

Laisal fataa man yakuulu 'Hadza Abii' , innal fataa man yakuulu 'Haa Ana Dza' (Bukanlah seorang pemuda yang mengatakan 'Inilah Ayahku' , sejatinya seorang pemuda adalah yang mengatakan 'Inilah Aku'

(Ali Bin Abi Thalib)

Ketika kedua orangtua masih hidup dengan sehat, itulah kekayaan nomor satu yang harus di syukuri setiap hari

(Ismioni Rahmawati)

Mindset is doa, perjuangan adalah seni

(Ali Zainal Abidin & Sayyid Muhammad)

PERSEMBAHAN



Dengan mengucapkan Alhamdulillah atas Rahmat Allah Subhanallahu Wa Ta'ala, sebagai rasa syukur dan terimakasih yang tulus, ku persembahkan karya ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta

Terimakasih untuk semua dukungan baik moril maupun materil, kasih sayang, pengorbanan dan segala doa untukku.

Keluarga besar dan sahabat tersayang

Terimakasih atas dukungan dan doa yang selalu menyertaiku.

Almamater Tercinta

UNIVERSITAS LAMPUNG

SANWACANA



Segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Implementasi Kebijakan Graduasi Dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Studi Kasus Pada PKH di Desa Gedung Jaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waykanan Tahun 2021)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara (SAN) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam banyak hal untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini antara lain:

1. Ibu Intan Fitri Meutia S.A.N., M.A. Ph.D selaku dosen pembimbing pertama, terima kasih atas bimbingan, dukungan, bantuan, nasihat, dan motivasi yang ibu berikan selama mengerjakan skripsi sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Ibu Devi Yulianti S.A.N., M.A selaku dosen pembimbing kedua, terima kasih sudah dengan sabar membimbing penulis, mendengarkan keluh kesah penulis, memberikan saran, nasihat dan dukungan yang ibu berikan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

3. Bapak Bambang Utoyo S, M.Si selaku dosen pembahas dan penguji, terima kasih atas arahan, kritik, saran, dan nasihat yang telah ibu diberikan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Meliyana, S.IP., M.A. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung sekaligus Pembimbing Akademik yang selalu membantu penulis selama masa perkuliahan.
5. Ibu Ita Prihantinka, S.Sos., M.A. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, terima kasih atas ilmu yang telah penulis peroleh selama perkuliahan.
7. Mbak Wulan dan Bapak Johari selaku staff jurusan Ilmu Administrasi Negara, terima kasih telah banyak membantu kelancaran administrasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Bapak Aan Muslihin S.Kom selaku Pendamping PKH Desa Gedung Jaya yang sudah banyak membantu dan diizinkan melakukan penelitian di Desa Gedung Jaya sehingga penulis mendapatkan data-data yang dibutuhkan.
9. Segenap informan peneliti di Desa Gedung Jaya. Terimakasih kepada Bapak Ketut Namayasa Kepala Desa Gedung Jaya, Mba Endah, Mba Ita, Ibu Septiana sekaligus bibi ku, Ibu Kustati, Ibu Nur Hayati sekaligus ibu ku. Penulis mengucapkan terima kasih atas informasi, data dan telah memberi izin penelitian sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kedua orangtuaku Bapak Sutrimo dan Ibu Nur Hayati, dua orang yang sangat luar biasa perjuangan hidupnya, yang selalu mengingatkan untuk bersyukur, selalu menjadi penopang di segala masalah dan kesulitanku, dan selalu mendoakan yang terbaik untukku, ucapan terimakasih mungkin tidak cukup, tetapi tetap ku ucapkan terimakasih atas kerja keras kalian dan terimakasih telah menjadi orangtua yang hebat hingga aku bisa sampai di titik ini. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kalian.

11. Mas dan mba tersayang, Jon Sigit Bagio, Destri Astusi, dan Bayti Kurnia Sari yang menjadi tempat berkeluh kesah dan bercanda dengan adikmu ini. Semoga kita selalu akur ya. Adikku dan keponakan kesayangan Restiani Putri Agustin yang sudah bisa diajak curhat, photographer andalan dirumah. Azka Nur Lathifa si bungsu yang comel yang selalu mba rindukan. Bagas Prasetyo, Bilal Lutfi Al habsy, Farhan Fahrezi, Fahri Azmi Al Khafi para jagoanku semangat terus sekolahnya semoga bisa menjadi orang yang sukses.
12. Seluruh keluarga besar saudara-saudaraku yang aku sayangi, terimakasih sudah mendukung dan mendoakanku hingga aku bisa sampai sekarang ini.
13. Sahabat-sahabatku Fitria Ananda Sari, Agus Apriyani, Widya Andriyani, Nisa Ayu Lestari, Derra Khintana Leonity, Aku bersyukur ada kalian di hidupku. Kalian adalah bagian yang tidak terdefiniskan. Aku selalu berterimakasih untuk kalian yang sudah menjadi sahabat yang baik menemani suka dan duka, selalu berbagi semangat, masalah, berbagi cerita. Semoga ikatan tali pertemanan kita selalu terjaga selamanya.
14. Private Group Halfa Nur Faizah dan Sita Isnala Sari. Terimakasih sudah menjadi teman mengawali dan mengakhiri kehidupan perkuliahanku dengan baju hitam putih, dan terimakasih sudah membantu dan menemani dalam suka duka perjalanan proses ini, tetap semangat untuk kita jangan males-malesan.
15. Teman-teman jurusan Ilmu Administrasi Negara angkatan 2017 (Angkasa) yang tidak bisa disebutkan satu persatu, namun tidak akan pernah penulis lupakan atas semua kenangan dan cerita yang begitu berkesan selama melalui perjalanan di jurusan tercinta ini.
16. Teman-teman KKN Teba Pering Raya Noe, Suci, Kiya, Tata, Bang Refki, Afif terimakasih sudah berbagi suka dan duka selama 40 hari. Kalian sudah seperti keluarga pokoknya.
17. Keluarga Besar Universitas Lampung yang telah membantu penulis selama belajar di Universitas Lampung.

18. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Terima kasih untuk semuanya , semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Aamiin

Bandar Lampung, 2 November 2021
Penulis,

Ismioni Rahmawati

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR ISTILAH	xx
I. PENDAHULUAN	21
1.1 Latar Belakang.....	21
1.2 Rumusan Masalah	30
1.3 Tujuan Penelitian.....	31
1.4 Kegunaan Penelitian.....	31
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	33
2.1 Penelitian Terdahulu.....	33
2.2 Program Keluarga Harapan	34
2.2.1 Syarat Komponen PKH	38
2.2.2 Tujuan PKH	38
2.2.3 Hak dan Kewajiban KPM PKH.....	36
2.2.4 Pemutakhiran Data dan Transformasi Kepesertaan.....	37
2.3 Tinjauan tentang kebijakan.....	34
2.3.1 Implementasi kebijakan	38
2.3.2 Proses Implementasi Kebijakan.....	39
2.3.3 Keberhasilan Implementasi Kebijakan	40
2.3.4 Unsur yang Dipelajari dalam Studi Implementasi.....	43
2.3.5 Praktik Agen Pelaksana	44
2.3.6 Mengidentifikasi Arah Kebijakan.....	44
2.3.7 Mengidentifikasi Tujuan Kebijakan	45

2.3.8	Hubungan yang Kurang Efektif dan Konsekuensi yang Tidak Diinginkan	46
2.3.9	Standar Perbandingan	48
2.4	Tinjauan Tentang <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	50
2.5	Peran Kebijakan Graduasi dalam Mewujudkan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs).....	53
2.6	Kerangka Pikir	54
III. METODE PENELITIAN		57
3.1	Tipe dan Pendekatan Penelitian.....	57
3.2	Fokus Penelitian	58
3.3	Lokasi Penelitian	59
3.4	Sumber Data	60
3.4.1	Data primer	60
3.4.2	Data sekunder	60
3.5	Teknik Pengumpulan Data	61
3.5.1	Observasi	61
3.5.2	Wawancara	62
3.5.3	Dokumentasi	64
3.6	Teknik Analisis Data	65
3.6.1	Reduksi Data (<i>Data Reduction</i>).....	65
3.6.2	Penyajian Data (<i>Data Display</i>).....	65
3.6.3	Penarikan Kesimpulan	65
3.7	Teknik Keabsahan Data.....	66
3.7.1	Triangulasi	66
3.7.2	Melakukan Replikasi	67
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN		68
4.1	Gambaran Umum	68
4.1.1	Sejarah Desa Gedung Jaya.....	68
4.1.2	Kondisi Geografis.....	68
4.1.3	Tingkat Perkembangan Desa	69
4.1.4	Visi dan Misi Desa Gedung Jaya.....	77
4.1.5	Ekonomi Masyarakat	79

4.1.6	Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Gedung Jaya pada Masa Pandemi Covid-19	80
4.2	Hasil Penelitian	85
4.2.1	Implementasi Kebijakan Graduasi dalam Mewujudkan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) di Desa Gedung Jaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way kanan.....	86
4.2.2	Peran Kebijakan Graduasi dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs)	98
4.2.2.1	Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan	103
4.2.2.2	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Adil dan Inklusif serta Meningkatkan Kesempatan Brlajar Seumur Hidup Untuk Semua	107
4.3	Pembahasan	114
4.3.1	Implementasi Kebijakan Graduasi dalam Mewujudkan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) di Desa Gedung Jaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan.....	115
4.3.2	Peran Kebijakan Graduasi dalam Mewujudkan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	124
4.3.2.1	Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan.....	127
4.3.2.2	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Adil dan Inklusif serta Meningkatkan Kesempatan Brlajar Seumur Hidup Untuk Semua	129
	SIMPULAN DAN SARAN.....	134
	DAFTAR PUSTAKA	137
	LAMPIRAN.....	141

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Presentase Penduduk Miskin Provinsi Lampung Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019-2020	22
2. Sebaran KPM PKH Provinsi Lampung s/d Oktober 2020.....	25
3. Penelitian Terdahulu	33
4. Daftar Informan.....	63
5. Dokumen Penelitian.....	64
6. Sebaran Penduduk Desa Gedung Jaya Menurut Usia.....	70
7. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Gedung Jaya.....	71
8. Mata Pencaharian Penduduk Desa Gedung Jaya	73
9. Sarana dan Prasarana Desa Gedung Jaya.....	74
10. Pertanian	80
11. Peternakan.....	80
12. Daftar Modul Pertemuan Kelompok KPM PKH.....	82
13. Realisasi Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Gedung Jaya tahun 2020-2021	84
14. Peran dan Fungsi Pendamping PKH.....	93
15. Faktor Kemiskinan Masyarakat Gedung Jaya	100
16. Angka Putus Sekolah Gedung Jaya Tahun 2021	108
17. Angka Partisipasi Anak PKH Terhadap Akses Pendidikan Sekolah Menengah 110	
18. Hasil Implementasi Kebijakan Graduasi dalam Mewujudkan SDGs di Desa Gedung Jaya.....	133

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Tahapan Strategi Graduasi.....	29
2. Tahapan Dalam Implementasi.....	40
3. Implementasi Oleh Agen Pelaksana.....	42
4. Kerangka Pikir.....	56
5. Struktur Organisasi Desa Gedung Jaya.....	77
6. Absen Kehadiran Peserta Penerima PKH Gedung Jaya.....	83
7. Proses Pemutakhiran Data.....	85
8. Alur Graduasi KPM PKH.....	90
9. Skema Peran dan Fungsi Pendampingan.....	94
10. Kegiatan Sharing Ketua Kelompok PKH Bersama Pendamping PKH.....	95
11. Rumah Ibu Kustati Eks Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Gedung Jaya.....	97
12. Rumah Ibu Septiana Eks Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Gedung Jaya.....	98

DAFTAR ISTILAH

PKH	: Program Keluarga Harapan
KPM	: Keluarga Penerima Manfaat
MDGs	: <i>Millenium Development Goals</i>
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
CCT	: <i>Conditional Cash Transfer</i>
DTKS	: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
P2K2	: Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga
BPNT	: Bantuan Pangan Non Tunai
KIS	: Kartu Indonesia Sehat
KUBE	: Kelompok Usaha Bersama
KIP	: Kartu Indonesia Pintar
BSM	: Bantuan Siswa Miskin
SDM	: Sumber Daya Manusia
FDS	: <i>Family Development Session</i>

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagian besar negara-negara di dunia mengalami masalah kemiskinan, baik negara maju maupun negara berkembang. Di Indonesia sendiri pada Bulan Maret 2019 terdapat 25,14 juta penduduk miskin dengan rata-rata garis kemiskinan per rumah tangga adalah sebesar Rp1.990.170/bulan (Badan Pusat Statistik, 2019). Menurut Cahyono dan Iryani (dalam Arfiyani dkk, 2020) kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar ataupun akses pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan sering dikaitkan dengan kesenjangan ekonomi antar kelompok masyarakat, yang didalamnya banyak sekali masyarakat yang tidak mampu untuk memelihara dirinya sendiri yang sesuai dengan taraf kehidupan kelompoknya dan tidak mampu untuk memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.

Efek yang ditimbulkan dari adanya kemiskinan cenderung akan menyebar (*multiplier effects*) dalam kehidupan masyarakat. Kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dapat menimbulkan ancaman secara fisik maupun mental masyarakat sehingga akan menjadi faktor penghambat jalannya berbagai macam aspek kehidupan. Oleh karena itu, permasalahan kemiskinan perlu diselesaikan secara terpadu dan terorganisir (Permana dan Cahyo, 2018). Namun fakta dilapangan menunjukkan bahwa upaya menekan angka kemiskinan bukanlah hal yang mudah, meskipun berbagai pendekatan dan solusi dilakukan untuk menyelesaikan kemiskinan tersebut. Masih

banyak penduduk miskin atau bahkan sangat miskin dari berbagai daerah di Indonesia termasuk didalamnya adalah Provinsi Lampung. Oleh sebab itu, sejalan dengan meningkatnya penduduk miskin di berbagai daerah, pemerintah diharapkan dapat lebih insentif mencari solusi terbaik untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.

Tabel 1. Presentase Penduduk Miskin Provinsi Lampung Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019-2020

No.	Kabupaten/Kota	2019 (%)	2020 (%)
1	Lampung Barat	12,52	12,92
2	Tanggamus	11,68	12,05
3	Lampung Selatan	14,08	14,31
4	Lampung Timur	14,62	15,24
5	Lampung Tengah	11,82	12,03
6	Lampung Utara	19,30	19,90
7	Way Kanan	12,90	13,07
8	Tulang Bawang	9,33	9,35
9	Pesawaran	14,76	15,19
10	Pringsewu	9,97	10,15
11	Mesuji	7,33	7,47
12	Tulang Bawang Barat	7,39	7,75
13	Pesisir Barat	14,29	14,48
14	Kota Bandar Lampung	8,81	8,71
15	Kota Metro	8,47	8,68
Rata-Rata Penduduk Miskin Provinsi Lampung		12,34	12,62

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Berdasarkan pada tabel 1, dapat disimpulkan bahwa angka rata-rata penduduk miskin di Provinsi Lampung mengalami peningkatan sebesar 0,28% yaitu pada tahun 2019 rata-rata penduduk miskin berada pada angka 12,34% namun di tahun 2020 meningkat menjadi 12,62%. Jika dilihat rata-rata penduduk miskin menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, terdapat tiga Kabupaten/Kota dengan urutan penduduk miskin terbanyak. Kabupaten/Kota tersebut ialah Kabupaten Lampung Timur yang mengalami peningkatan penduduk miskin sebesar 0,62%, Kabupaten Lampung Utara dengan peningkatan penduduk miskin

sebesar 0,6%, dan Kabupaten Pesawaran dengan peningkatan penduduk miskin sebesar 0,43%. Berbeda dengan Kabupaten/Kota lainnya, Kota Bandar Lampung justru mengalami penurunan penduduk miskin sebesar 0,1% yaitu pada tahun 2019 penduduk miskin di Kota Bandar Lampung mencapai angka 8,81% dan menurun di tahun 2020 menjadi 8,71%. Sebaliknya, Kabupaten Way Kanan mengalami peningkatan penduduk miskin yaitu sebesar 12,90% pada tahun 2019 dan 13,07% pada tahun 2020, sehingga menjadikan Kabupaten Way Kanan berada pada urutan ke sepuluh di Provinsi Lampung. Dari hasil selisih dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Way Kanan mengalami peningkatan penduduk miskin sebesar 0,17%.

Dalam percepatan penanggulangan kemiskinan pemerintah Indonesia melalui berbagai program perlindungan sosial. Program merupakan rencana atau rancangan kegiatan yang akan dilakukan. Program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, juga berlangsung dalam proses yang berkesinambungan terjadi (Yulianti, 2018). Pada penelitian ini, program perlindungan sosial yang dimaksudkan adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini telah dilaksanakan sejak tahun 2007 melalui Kementerian Sosial. Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kriteria penerima bantuan PKH berdasarkan tiga komponen yaitu, komponen kesehatan yang terdiri dari ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun, komponen pendidikan yaitu terdiri dari anak SD/ sederajat, SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat, dan komponen kesejahteraan sosial yang terdiri dari lanjut usia dan penyandang disabilitas berat (Kementerian Sosial RI, 2020)

Dalam dunia internasional program semacam ini dikenal dengan istilah *Conditional Cash Transfers (CCT)* yang artinya bantuan bersyarat. Menurut Rawlings and Rubio (dalam Sari, 2020), CCT adalah bagian dari program generasi baru yang berusaha membantu peningkatan akumulasi modal manusia (*human capital*) pada orang muda sebagai cara untuk memutuskan siklus kemiskinan antar-generasi. PKH secara khusus bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi.

Dengan adanya PKH akan memberikan manfaat jangka panjang dan jangka pendek seperti meningkatkan taraf hidup KPM, mengurangi beban pengeluaran KPM, mengurangi kesenjangan, dan menciptakan kemandirian keluarga untuk mengakses layanan kesehatan dan pendidikan. Sebagai bantuan sosial bersyarat PKH membuka akses KPM bagi ibu hamil dan balita untuk memanfaatkan fasilitas/layanan kesehatan (faskes) dan anak usia sekolah untuk memanfaatkan fasilitas/layanan pendidikan yang ada disekitar tempat tinggalnya mulai dari tingkat Pendidikan Sekolah Dasar (SD) hingga tingkat pendidikan SMA/SMK sederajat. KPM PKH juga mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan orientasi meningkatkan taraf kesejahteraan sosial dan kesehatannya (Kementerian Sosial RI, 2020)

PKH lebih dimaksudkan untuk membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan

Sosial Secara Non Tunai dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Penerima bantuan PKH di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jumlah penerima PKH tahun 2019 sebanyak 9.841.270 keluarga dengan anggaran sebesar 34,2 triliun. Pada bulan Januari 2020 jumlah penerima PKH mengalami peningkatan menjadi 10.000.000 KPM dengan total anggaran sebesar 37,4 triliun. Pelaksanaan PKH di Provinsi Lampung sendiri sudah dilakukan sejak tahun 2010 pada empat Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kota Bandar Lampung. Sampai saat ini pelaksanaan PKH telah mencapai 15 Kabupaten/Kota yang ada di Lampung. Pada bulan Oktober 2020 jumlah penerima PKH di Provinsi Lampung mencapai angka sebesar 471.524 KPM (Aini, 2018).

Tabel 2. Sebaran KPM PKH Provinsi Lampung s/d Oktober 2020

Kabupaten/Kota	KPM	Bantuan	(%)
Bandar Lampung	39.162	29.681.000.000	8.31%
Metro	4.120	2.963.525.000	0.87%
Lampung Barat	17.681	12.985.375.000	3.75%
Lampung Selatan	56.012	41.705.925.000	11.88%
Lampung Tengah	71.576	52.896.950.000	15.18%
Lampung Timur	68.157	49.276.775.000	14.45%
Lampung Utara	50.713	39.143.000.000	10.76%
Mesuji	10.144	7.054.175.000	2.15%
Pesawaran	32.283	25.177.525.000	6.85%
Pesisir Barat	10.826	10.031.025.000	2.3%
Pringsewu	19.569	14.145.775.000	4.15%
Tanggamus	39.870	31.471.400.000	8,46%
Tulang Bawang Barat	12.472	9.428.075.000	2.65%
Tulang Bawang	15.690	11.544.875.000	3.33%
Way Kanan	23.249	17.791.875.000	4.93%
Total	471.524	355.297.275.000	100%

Sumber : Sebaran KPM dan SDM PKH di Indonesia Tahap 4 2020

Berdasarkan tabel 2 diatas, dapat disimpulkan bahwa pada Bulan Oktober bantuan PKH sepenuhnya telah disalurkan diseluruh kabupaten yang ada di Provinsi Lampung salah satunya ialah Kabupaten Way Kanan. Meskipun Kabupaten Way Kanan letak wilayahnya cukup jauh dari pusat kota dan banyak wilayah-wilayah terpencil yang masih sulit diakses namun pencapaian penyaluran dan dana PKH di Kabupaten cukup tinggi jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten lain. Kabupaten Way Kanan menempati peringkat ke delapan dengan total penerima PKH sebanyak 23.249 KPM. Implementasi PKH membantu menurunkan angka kemiskinan serta mengurangi kesenjangan dalam masyarakat Kabupaten Way Kanan, sebagaimana disampaikan oleh Adipati Surya selaku Bupati Way Kanan, dikutip dari berita online berikut ini:

“PKH adalah salah satu program unggulan sebagai tahapan perlindungan sosial, program ini terbukti cukup berhasil dan telah berkontribusi besar dalam penurunan kemiskinan dan kesenjangan yang ada di Kabupaten Way Kanan. PKH di Kabupaten Way Kanan mulai diimplementasikan sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini telah mencangkup 14 kecamatan, 227 kelurahan dan kampung. Setiap tahun akan dilakukan validitas data calon KPM sehingga jumlah penerima PKH akan meningkat tiap tahunnya. Peningkatan jumlah penerima PKH bukan dikarenakan adanya peningkatan angka kemiskinan di Kabupaten Way Kanan, akan tetapi dikarenakan perluasan jumlah KPM” (Rahmat, 2019).

Sejalan dengan pernyataan Bupati Way Kanan yang dimuat dalam berita online, SMERU (dalam Wulandari dkk, 2013) menyatakan bahwa Program Keluarga Harapan telah terbukti memberikan dampak positif diberbagai wilayah terhadap peningkatan kunjungan ke fasilitas kesehatan dan partisipasi pendidikan. Sementara dalam pelaksanaannya Program Keluarga Harapan memiliki kelemahan pada proses *targeting* atau ketepatan penentuan sasaran keluarga miskin yang berhak mendapatkan bantuan tersebut. Menurut Fiszbein *and* Schady (dalam Wulandari dkk,

2013) terdapat dua jenis yang kesalahan dalam menganalisis kesalahan *targeting*, yaitu cakupan yang kurang dan kebocoran. *Mis-targeting* diartikan bahwa terdapat rumah tangga miskin yang memenuhi syarat namun dikecualikan dari program. Disisi lain terdapat rumah tangga tidak miskin yang salah diidentifikasi masuk kedalam jangkauan program. Oleh sebab itu inovasi terus dilakukan pemerintah dalam memperbaiki jalannya Program Keluarga Harapan agar tujuan dari program tersebut dapat tercapai dengan baik.

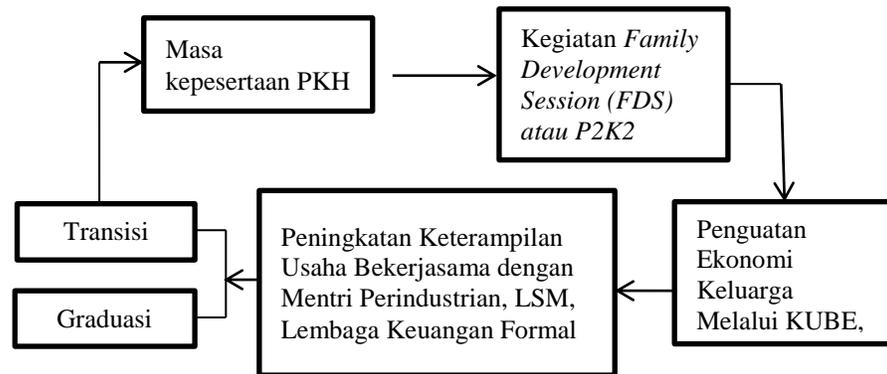
Permasalahan ketidaktepatan sasaran merupakan salah satu permasalahan yang disoroti oleh Kantor Wakil Presiden Indonesia (Gardiner, 2013). Oleh sebab itu pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia mengupayakan ketepatan sasaran bantuan dan mewujudkan rasa keadilan sosial yang dimuat dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 56 tentang Graduasi PKH. Graduasi merupakan berakhirnya masa kepesertaan PKH meskipun program PKH tersebut masih berlangsung. Graduasi dapat terjadi secara alami (terminasi) dan graduasi secara mandiri (Bappenas, 2019).

Indikator alami berakhirnya masa kepesertaan PKH atau graduasi ialah KPM yang berkaitan tidak lagi memenuhi komponen syarat penerima PKH, seperti komponen kesehatan yaitu terdiri atas ibu hamil dan balita, komponen pendidikan yaitu usia wajib belajar (SD-SMA/ sederajat), dan komponen kesejahteraan yaitu terdiri atas lanjut usia dan penyandang disabilitas berat. Selain itu graduasi juga diterapkan kepada mereka yang memiliki usaha yang dirintis meskipun masih dalam skala kecil namun telah berjalan lancar. Graduasi ini dilakukan karena KPM tersebut dianggap telah mampu secara mandiri untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarganya. (Khoiriyah dan Kunarti, 2019)

Pada tahun 2020 jumlah peserta PKH yang telah graduasi di Indonesia sebesar 2.012.201 KPM, Provinsi Lampung sebanyak 444.164 KPM termasuk didalamnya KPM graduasi dari Kabupaten Way Kanan pada Bulan Januari 2020 yaitu mencapai angka 23.135 KPM (Fikri, 2020). Bapak Aan Muslihin sebagai pendamping PKH Desa Gedung Jaya mengatakan bahwa:

“Terdapat 150 KPM di Kecamatan Negara Batin yang telah graduasi, sedangkan jumlah peserta PKH yang telah graduasi di Desa Gedung Jaya sendiri sebanyak 21 KPM, yang terdiri atas 14 KPM graduasi alami dan 7 KPM graduasi mandiri”. (*Sumber: Hasil Wawancara Pra-riset, 13 November 2020, 10:00 WIB, Desa Gedung Jaya*).

Dengan adanya 7 KPM Desa Gedung Jaya yang melakukan graduasi mandiri, menjadi salah satu indikasi keberhasilan pelaksanaan PKH di desa tersebut. Graduasi merupakan *outcome* dari PKH. *Targeting* graduasi pada tahun 2019 yaitu KPM PKH yang telah berdaya. Oleh sebab itu pendamping PKH berperan untuk memotivasi dan menggerakkan KPM agar memanfaatkan bantuan dan fasilitas PKH dengan sebaik-baiknya sehingga pada akhirnya dapat mendorong kesadaran diri KPM untuk lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sekaligus meningkatkan ekonomi keluarganya. Untuk menetapkan graduasi pada KPM PKH diperlukan tahapan-tahapan strategi graduasi hingga menjadikan kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi KPM tersebut.



Gambar 1. Tahapan Strategi Graduasi.

Sumber: Strategi Menggraduasi KPM PKH (dikelola kembali oleh peneliti 2020)

Tujuan dari kebijakan graduasi ialah mendukung upaya percepatan pengentasan kemiskinan sejalan dengan tujuan PKH, memastikan penerima bantuan sosial PKH tepat sasaran, meminimalisir timbulnya kesenjangan sosial, dan mewujudkan rasa keadilan sosial (Kementrian Sosial RI, 2020). Disamping itu, PKH dan graduasi diharapkan dapat mendukung terwujudnya tujuan-tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) khususnya pada tujuan pertama dan keempat pada SDGs, yaitu menghilangkan segala bentuk kemiskinan dan menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua (Panuluh dan Fitri, 2016). Dalam tujuan pertama SDGs, salah satu target sasaran SDGs adalah presentase penduduk yang tercakup dalam perlindungan sosial. Sedangkan pada tujuan keempat SDGs, salah satu indikator yang digunakan adalah angka kelulusan sekolah menengah untuk anak laki-laki dan anak perempuan (Sutopo dkk, 2014).

Pada tujuan pertama dan keempat SDGs merupakan beberapa tujuan yang mencerminkan pembangunan manusia di SDGs dan merupakan

aspek yang tertera dalam pilar sosial. (Alisjahbana dan Murniningtyas, 2018). Peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan dan pemerataan kesejahteraan seluruh masyarakat, serta pelestarian lingkungan hidup saat ini telah dijadikan tujuan mutlak pembangunan. Dalam hal ini administrasi negara digunakan untuk mengelola pembangunan. Oleh sebab itu, pembangunan sangat erat hubungannya dengan administrasi negara (Anggara, 2016).

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, peneliti tertarik memilih lokasi penelitian di Desa Gedung Jaya ini, untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan graduasi yang dimaksudkan untuk tujuan pembangunan berkelanjutan. Sehingga penulis bermaksud melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Implementasi Kebijakan Graduasi dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Studi Pada PKH Desa Gedung Jaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan Tahun 2021)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan graduasi di Desa Gedung Jaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way kanan?
2. Apa peran kebijakan graduasi dalam mewujudkan SDGs di Desa Gedung Jaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pelaksanaan kebijakan graduasi graduasi di Desa Gedung Jaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan dengan mengguakan indikator yang diambil dari teori keberhasilan implementasi kebijakan menurut Anne L. Scheneider (2016).
2. Mengidentifikasi peran kebijakan graduasi dalam upaya mewujudkan SDGs di Desa Gedung Jaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan khususnya pada tujuan pertama dan keempat pada SDGs.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbagsih referensi dibidang perlindungan sosial dalam menggraduasi kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) khususnya pada pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan masalah graduasi Program Keluarga Harapan (PKH).

2. Manfaat Praktis

- a. Kontribusi data penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Graduasi Dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) kelompok Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Gedung Jaya.
- b. Kontribusi data penelitian mengenai pelaksanaan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam lingkaran Program Perlindungan Sosial.

- c. Acuan untuk penelitian lanjut mengenai Implementasi Kebijakan Graduasi Dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs).
- d. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar evaluasi pelaksanaan graduasi PKH di Desa Gedung Jaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan.
- e. Hasil penelitian dapat digunakan untuk menentukan suatu strategi Implementasi Kebijakan Graduasi Dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) kelompok Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Gedung Jaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Studi penelitian tentang PKH dan graduasi sudah banyak dilakukan oleh peneliti terlebih dahulu dengan berbagai macam aspek kajian. Penelitian terdahulu memudahkan penulis dari segi konsep, teori dan mempermudah dalam menentukan langkah-langkah sistematis dari konsep dan teori tersebut. Adapun penelitian terdahulu tentang graduasi lebih melihat kepada faktor yang mempengaruhi KPM mau melakukan kebijakan graduasi dan dampak paska KPM PKH melakukan graduasi. Berikut adalah penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis sebagai referensi:

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
(Fadliyaturohmah, 2018)	Graduasi Mandiri dari PKH di Desa Wukiharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta	Implementasi PKH di Desa Wukiharjo berjalan sesuai pedoman. Namun sejak tahun 2008 hingga 2018, tercatat hanya ada 4 KPM.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Fokus penelitian terdahulu adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi KPM PKH melakukan graduasi. Sedangkan fokus pada penelitian ini ingin melihat bagaimana implementasi graduasi dan peran dari graduasi dalam mewujudkan SDGs
Kunarti dan Nur Khoiriyah (2019)	Graduasi Mandiri: Bentuk Keberdayaan KPM PKH di	Bentuk keberdayaan KPM paska graduasi adalah kebebasan	Perbedaan terletak pada pendekatan atau indikator yang digunakan dalam penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan tingkat mobilitas, daya beli,

Tabel 3 (Lanjutan)

	Kabupaten Pati	mobilitas, kemampuan membeli komoditas kecil, memiliki jaminan ekonomi, dan kontribusi terhadap keluarga.	jaminan ekonomi, kontribusi diri pada lingkungan keluarga. Sedangkan indikator penelitian ini: keberhasilan implementasi kebijakan, perubahan ekonomi eks KPM dan angka lulus sekolah tingkat sekolah menengah untuk anak perempuan dan laki-laki.
Ainun Oktavia Sari (2020)	Dampak Sosial Ekonomi Pada KPM PKH Exit Mandiri Di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Dalam Perspektif <i>The Most Significant Change Thenique (MSCT)</i>	Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, PKH di Kecamatan Pagelaran sudah memberikan perubahan yang baik terhadap ekonomi, kesehatan, dan pendidikan KPM meskipun belum cukup signifikan.	Perbedaan terletak pada pendekatan dan lokasi penelitian. Pendekatan pada Penelitian terdahulu: <i>The Most Significant Change Thenique (MSCT)</i> di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu. Sedangkan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan dari teori dari Scheneider (2016) dan pendekatan perubahan ekonomi eks KPM PKH secara umum di Desa Gedung Jaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan.

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2020

2.2 Program Keluarga Harapan

Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga (Kementerian Sosial, 2021) dalam buku pedoman pelaksanaan PKH 2021, Program Keluarga Harapan (PKH) diartikan sebagai salah satu bentuk program perlindungan sosial yang digunakan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia dalam bentuk bantuan sosial. PKH diarahkan sebagai *center of excellence* dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Dalam skala internasional PKH dikenal dengan istilah *Cash Conditional Transfer* (CCT) atau bantuan bersyarat. Di Indonesia PKH dilaksanakan secara berkelanjutan yang diawali di 7 provinsi pada tahun 2007. Sampai dengan tahun 2020

pelaksanaan PKH di Indonesia telah menjangkau 34 provinsi yang mana mencakup 514 kabupaten/kota dan 6.709 kecamatan. Berikut ini merupakan syarat komponen PKH, tujuan PKH, hak dan kewajiban PKH di masa pandemi covid-19, dan pemutakhiran data serta transformasi kepesertaan PKH:

2.2.1 Syarat Komponen PKH

PKH merupakan program pemberian bantuan bersyarat kepada keluarga miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memiliki komponen sebagai persyaratan untuk ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Berikut ini adalah kriteria penerima PKH yang dibedakan berdasarkan 3 komponen, yaitu:

1. Komponen kesehatan terdiri dari ibu hamil/nifas/menyusui dan anak usia dini (usia 0-6 tahun)
2. Komponen pendidikan yaitu anak usia 6 sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar yang menempuh pendidikan tingkat SD/Mi sederajat, SMP/MTS sederajat, dan SMA/MA sederajat.
3. Komponen kesejahteraan sosial yang terdiri dari lanjut usia dan penyandang Disabilitas Berat

2.2.2 Tujuan PKH

Program Keluarga Harapan memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam

mengakses layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.

4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
5. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM.

2.2.3 Hak dan Kewajiban KPM PKH

1. Hak KPM PKH:

KPM PKH berhak mendapatkan:

- a. Bantuan sosial PKH;
- b. Pendampingan sosial PKH;
- c. Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial;
- d. Program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energy, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

2. Kewajiban KPM PKH di masa pandemi covid-19:

- a. KPM yang termasuk ke dalam komponen kesehatan melaksanakan pola hidup sehat dan menerapkan protokol kesehatan.
- b. Anak PKH yang termasuk ke dalam komponen pendidikan wajib mengikuti kegiatan belajar dengan menerapkan protokol kesehatan.
- c. KPM yang termasuk ke dalam komponen kesejahteraan sosial wajib mengikuti kegiatan dibidang komponen tersebut dengan menerapkan protokol kesehatan.
- d. KPM wajib menerima dan menerapkan materi-materi yang ada dalam modul P2K2 khususnya modul kesehatan dan penerapan protokol kesehatan.

2.2.4 Pemutakhiran Data dan Transformasi Kepesertaan

Tujuan kegiatan pemutakhiran data adalah untuk memperoleh kondisi terkini anggota KPM PKH. Data tersebut digunakan untuk verifikasi, penyaluran dan penghentian bantuan. Berikut ini adalah informasi perubahan KPM yang didapat dari pemutakhiran data:

1. Perubahan status eligibilitas KPM PKH;
2. Perubahan nama pengurus dikarenakan meninggal, cerai, dan sebagainya;
3. Perubahan komponen kepesertaan;
4. Perubahan fasilitas kesehatan yang diakses;
5. Perubahan fasilitas pendidikan yang diakses;
6. Perubahan domisili KPM;
7. Perubahan data pengurus dan anggota keluarga sesuai dengan data kependudukan;
8. Perubahan data bantuan komplementer;
9. Perubahan kondisi sosial ekonomi.

Transformasi kepesertaan adalah proses pengakhiran sebagai KPM PKH melalui kegiatan resertifikasi (pendataan ulang). Setelah menerima bantuan selama 6 tahun, setelah itu diharapkan ada perubahan perilaku terhadap KPM PKH dibidang kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial dan peningkatan status sosial ekonomi. Hasil dari resertifikasi digunakan untuk menetapkan status transisi atau graduasi.

1. Transisi adalah peserta PKH yang kondisinya masih memenuhi syarat PKH. Pada tahap transisi, peserta masi menerima bantuan maksimal 3 tahun dengan tetap memenuhi

kewajibannya sebagai KPM PKH dan dipersiapkan untuk menerima program pengentasan kemiskinan lainnya.

2. Graduasi adalah peserta PKH yang memenuhi 3 syarat yaitu:
 - a. Masih miskin tetapi tidak memiliki syarat PKH;
 - b. Tidak miskin tetapi masih memiliki syarat PKH;
 - c. Tidak miskin dan tidak memenuhi syarat.

2.3 Tinjauan tentang Kebijakan

Menurut Dunn (dalam Anggara, 2016), istilah kebijakan berasal dari bahasa Yunani, Sanskerta dan Latin. Dalam bahasa Yunani dan Sanskerta kebijakan (polis) artinya negara-kota. Sedangkan dalam bahasa Latin adalah politia yang artinya negara. selanjutnya dalam bahasa Inggris yaitu policie yang diartikan sebagai masalah-masalah public atau administrasi pemerintahan. Secara komprehensif kemudian Dye (dalam anggara, 2016), menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah semua yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah.

2.3.1 Implementasi kebijakan

Mazmanian *and* Sabatier (dalam Anggara, 2016) mengatakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang atau dalam bentuk perintah dan keputusan, serta dalam bentuk peradilan lainnya. Anggara (2018) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah fungsi dari pilar organisasi dan manajemen. Dalam perspektif ini, unsur organisasi adalah negara dan manajemen adalah pemerintahan. Dewasa ini banyak ilmuwan yang menyadari bahwa keberhasilan atau kegagalan kebijakan tidak hanya bergantung pada kecukupan teori yang ada didalam sebuah kebijakan yang dibuat, tetapi juga pada proses implementasi kebijakan tersebut.

Menurut Udoji (dalam Meutia, 2013) implementasi kebijakan jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan itu sendiri. Kebijakan hanya akan menjadi impian atau rencana yang bagus dan tersimpan dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Hal serupa juga dikemukakan oleh Williams *and* Elmore (dalam Schneider, 2016) yang menyebutkan bahwa kesulitan terbesar dalam merancang program sosial yang lebih baik bukanlah menentukan apa kebijakan yang masuk akal, tetapi menemukan cara bagaimana kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dilapangan sesuai dengan tujuan yang ditentukan.

2.3.2 Proses Implementasi Kebijakan

Banyak literatur tentang implementasi mengacu pada istilah yang digunakan oleh Williams untuk merujuk pada proses perubahan yang terjadi setelah mengadopsi kebijakan dan rutinitas operasi, aktivitas, atau tugas yang diatur oleh kebijakan yang ada sebelumnya. Menurut Schneider (2016) mengatakan bahwa dalam proses implementasi kebijakan fase perencanaan terjadi setelah undang-undang atau kebijakan lain diadopsi. Kegiatan-kegiatan yang biasanya terjadi selama tahap perencanaan antara lain mengidentifikasi orang-orang yang bertanggungjawab dan mengkoordinasi jalannya kegiatan, mengkomunikasikan kebijakan kepada orang-orang tersebut, pelatihan, menyiapkan pedoman tertulis, memobilisasi sumber daya, membuat proposal, menyiapkan kontrak, dan memobilisasi dukungan untuk undang-undang melalui pendidikan publik.

Untuk mulai mengimplementasikan kebijakan biasanya dilakukan dengan menggunakan prosedur baru, aktivitas baru, tugas baru, dan pembukaan fasilitas baru, serta dimensi lain dari lembaga

yang bersangkutan. Melalui serangkaian lembaga pemerintah ada beberapa perencanaan dan fase permulaan yang dilakukan sebelum agen pelaksana mulai mengirimkan layanan atau melakukan tugas-tugas yang di atur dalam undang-undang. Sebagai contoh dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui tingkatan lembaga-lembaga yaitu:

1. Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) sebagai pusat koordinator pelaksanaan PKH.
2. Provinsi selaku Koordinator Wilayah (Korwil).
3. Kabupaten/kota selaku Koordinator Kabupaten (Korkab).
4. Kecamatan sebagai Koordinator Kecamatan (Korcam).
5. SDM pendamping PKH yang dianggap sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan PKH.

Policy	Agency	New	Implementation
Adoption	Planning	Procedures	Ends
	Begins	Begin	
↓	↓	↓	↓
	Planning	Start-Up/Fine Tuning	Rountinization

Gambar 2. Tahapan Dalam Implementasi.

Sumber: Studying Policy Implementation Menurut Schneider (2016)

2.3.3 Keberhasilan Implementasi Kebijakan

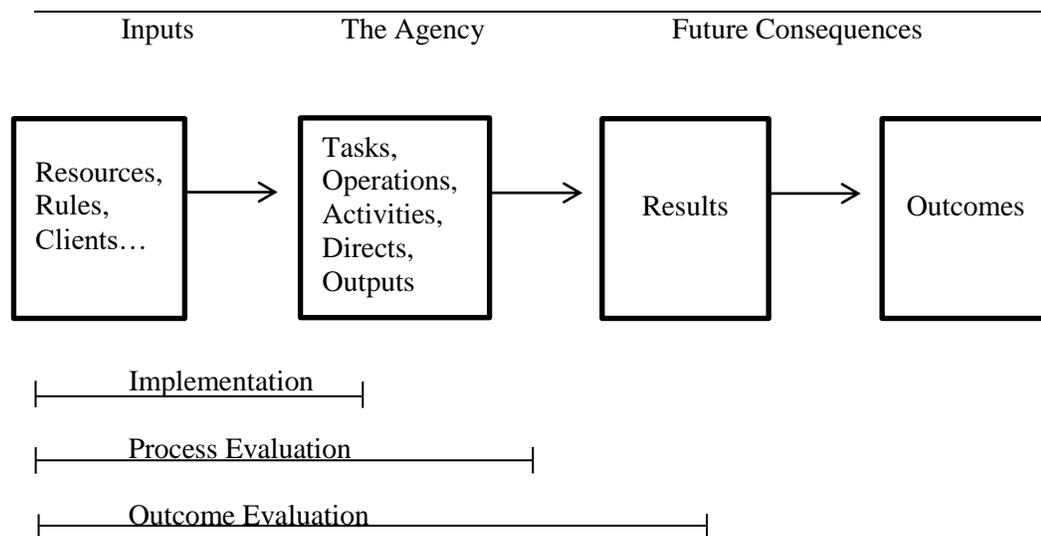
Menurut Schneider (2016), ada lima faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut yaitu: kelangsungan kebijakan, integritas, kapasitas dan ruang lingkup

operasi, kegiatan yang dipengaruhi oleh kebijakan, dan tidak ada efek negatif yang terjadi. Kebijakan dianggap layak jika elemen yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan ada dan berfungsi. Malcolm Klein (dalam Scheneider, 2016) mengatakan bahwa jika pelaksanaan kegiatan dilakukan secara konsisten dengan konsep kebijakan sentral dengan sedemikian rupa maka tujuan sosial dari kebijakan tersebut dapat tercapai. Ruang lingkup dan kapasitas mengacu pada apakah kegiatan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan kelompok sasaran yang dituju dan apakah aktivitas, klien, biaya, atau operasional lainnya yang diatur oleh kebijakan sudah berada pada strata tingkatan yang tepat.

Hasil dari sebuah kebijakan dapat dilihat dari kualitas implementasi kebijakan yang ditentukan oleh tugas dan kegiatan kebijakan itu sendiri atau ditentukan oleh pernyataan legislatif (aspek politik) diluar kendali dari agen pelaksana. Jika kualitas implementasi kebijakan dilihat berdasarkan tugas dan kegiatan dalam kebijakan, ketika tujuan kebijakannya tidak tercapai maka rusaknya proses implementasi serta teori yang tidak memadai bukanlah hal utama yang menjadi faktor kegagalan. Tetapi hasil evaluasi yang nantinya akan menentukan apakah tugas dan kegiatan tersebut mampu mencapai tujuan serta memberikan perubahan yang lebih baik.

Baik proses maupun hasil evaluasi akan menentukan apakah praktik yang dilakukan agen pelaksana menghasilkan konsekuensi yang terpisah dari tugas yang dijalankan. Namun sebaliknya, studi implementasi lebih terfokus pada evaluasi tugas, operasi, kegiatan, dan output langsung yang dihasilkan oleh kebijakan itu sendiri. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, implementasi kebijakan perlu melakukan evaluasi karena menyangkut

kelangsungan hidup, integritas teoritis, kapasitas, ruang lingkup, dan konsekuensi yang tidak diinginkan. Ada dua masalah mendasar yang dihadapkan dalam studi yang mempelajari tentang implementasi, yaitu pilihan standar yang menjadi dasar kualitas implementasi dan pilihan elemen yang akan dimasukkan kedalam studi implementasi (kegiatan, tugas, dan prosedur).



Performance Measures for Implementation

- (a) Viability. Are the elements present, operative, on schedule?
- (b) Theoretical Integrity. Are the operations consistent with the central concept (e.g., theory) of the policy and consistent with the conditions that are necessary or crucial to achieve the future results and outcomes?
- (c) Scope. Are the resourch and activities directed at the intended target population?
- (d) Capacity. Are the activities, clients, costs at the expected levels?
- (e) Unintended Consequences. Have negative side effects been felt by other agencies?

Gambar 3. Implementasi Oleh Agen Pelaksana

Sumber: Studying Policy Implementation Menurut Schneider (2016:719)

2.3.4 Unsur yang Dipelajari dalam Studi Implementasi

Hasil evaluasi sering mendapat kritikan karena mengadopsi pandangan yang terlalu sederhana tentang tugas, kegiatan, dan prosedur operasional yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Studi implementasi cenderung mengalami masalah seperti terlalu banyak kesederhanaan atau malah terlalu banyak detail pembahasan yang justru dapat menggagalkan tujuan studi implementasi. Kesalahan tersebut dapat mengakibatkan orang tidak tahu apakah kebijakan yang dilaksanakan penting dan apakah yang tidak relevan dengan kinerja dari keseluruhan sistem yang ada. Menurut (Schneider, 2016) terdapat beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk memisahkan elemen penting dari praktik agen pelaksana yang tidak relevan, yaitu:

- a. Dalam penelitian, elemen yang merupakan sarana daripada tujuan harus memiliki prioritas tertinggi. Misalnya, kegiatan yang dilakukan dalam acara tertentu, harus mencapai tujuan sesuai yang telah ditetapkan.
- b. Unsur-unsur yang diperlukan untuk pencapaian tujuan mendatang juga harus memiliki prioritas tinggi untuk dimasukkan, terutama jika ada alasan untuk percaya bahwa masalah dapat muncul kapan saja.
- c. Elemen yang digabungkan harus cukup untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan anggapan bahwa teori itu benar.
- d. Indikasi dan kegagalan yang tidak diinginkan baik jangka pendek maupun jangka panjang juga harus diperhatikan untuk dimasukkan ke dalam studi implementasi.

2.3.5 Praktik Agen Pelaksana

Scheneider (2016), mengatakan bahwa berhasil atau tidaknya tugas dan kegiatan dalam implementasi kebijakan juga bergantung dengan bagaimana agen pelaksana menjalankan tugasnya (*agency practies*). tugas agen pelaksana adalah serangkaian titik keputusan yang didefinisikan sebagai titik atau proses didalam badan atau lembaga yang diikuti dengan opsi mengenai kemana masalah tersebut akan dibawa dan langkah apa yang harus ditempuh untuk menyelesaikannya. Setiap poin keputusan harus menjawab enam item pokok, yaitu: keadaan, otoritas dan partisipasi, pilihan, kriteria, insentif, dan waktu.

2.3.6 Mengidentifikasi Arah Kebijakan

Arah kebijakan biasanya mengacu pada aspek-aspek didalam undang-undang yang menggambarkan bagaimana suatu lembaga seharusnya beroperasi. Arah kebijakan akan berdampak pada prosedur masuk, pemrosesan, dan keluar. Kebijakan dapat mendefinisikan kembali dengan menyediakan beberapa pilihan solusi, misalnya dengan mengubah kriteria yang seharusnya digunakan, mengubah distribusi otoritas dan partisipasi dalam sebuah lembaga untuk membuat keputusan, atau mereka dapat mengubah intensif dengan tujuan untuk memilih satu opsi dari pada yang lainnya. Kebijakan dapat mengubah keadaan dimana prosedur pengambilan keputusan tertentu akan digunakan.

Klein *and* Teilman (dalam Scheneider, 2016) menyebutkan bahwa *mandate* yang ada didalam undang-undang menjadi hal penting untuk memahami bagaimana kebijakan akan berdampak pada pelaksana kebijakan. Kebijakan dapat berisi ‘meminta’ (perintah),

‘mendorong’, ‘mengizinkan’, ‘mencegah’, atau ‘melarang’. Hal ini tentu secara umum dapat mempengaruhi tingkat kebijaksanaan terhadap individu tertentu dalam sebuah sistem.

2.3.7 Mengidentifikasi Tujuan Kebijakan

Setelah menentukan arah kebijakan, sebuah tujuan kebijakan juga penting untuk ditentukan sejak awal. Langkah awal dalam menentukan tujuan kebijakan ialah menjadikan kebijakan publik sebagai keputusan yang mengalokasikan masalah-masalah dalam masyarakat. Manfaat dan biaya yang ada ditujukan untuk public seperti perlindungan dari kejahatan. Menurut Lasswell (dalam Schneider, 2016), kebijakan publik menentukan ‘siapa mendapatkan apa, bagaimana, dan apa alasannya’. Pendapat Harold dapat disandingkan dengan pernyataan Schneider (2016), yang mengatakan ‘dengan siapa sebenarnya mendapatkan apa, bagaimana, dan untuk alasan apa’.

Pernyataan dari kedua ahli terlihat sama tetapi Schneider lebih memperjelas pernyataannya bahwa masalah akan muncul apabila pernyataan kebijakan tidak jelas menunjukkan siapa yang seharusnya menjadi penerima kebijakan atau siapa harus menanggung biayanya. Makna dari penjelasan ini memiliki arti penting guna menentukan arah kebijakan, mengidentifikasi dampak terhadap distribusi kebijakan, dan digunakan untuk menentukan tujuan-tujuan lain. Tujuan kebijakan sejalan dengan studi implementasi dengan dua cara, yaitu:

1. Beberapa tujuan kebijakan dicapai dengan cara praktik agen pelaksana tertentu yang dilakukan sesuai dengan undang-undang.

2. Praktik yang dilakukan agen pelaksana memiliki hubungan yang krusial dengan kebijakan dan tujuan yang akan dicapai.

Dapat disimpulkan bahwa arah dan sasaran kebijakan merupakan dua hal yang saling berkaitan. Arah kebijakan yang ditentukan akan berdampak pada prosedur *input*, *process*, dan *output* dari kebijakan itu sendiri. Sedangkan sasaran kebijakan yang nantinya akan menentukan siapa yang mendapat, apa yang didapat, dan apa alasannya.

2.3.8 Hubungan yang Kurang Efektif dan Konsekuensi yang Tidak Diinginkan

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa studi tentang implementasi kebijakan melibatkan evaluasi praktik keagenan. Dalam hal ini Schneider (2016) menyebutkan aspek-aspek apa saja yang harus dimasukkan ke dalam studi implementasi. Adapun aspek-aspek tersebut ialah tujuan utama kebijakan, hal-hal yang berkaitan dengan tujuan kebijakan terutama hal yang digunakan sebagai alasan munculnya masalah, dan hal-hal yang tidak diinginkan atau resiko negatif yang kemungkinan terjadi sebagai bentuk antisipasi. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi keterkaitan lemah atau hubungan yang kurang efektif dalam implementasi kebijakan adalah dengan melibatkan spesifikasi dari variable dependen yang menarik dan pemeriksaan sistematis terhadap faktor-faktor penyebab kegagalan implementasi.

Secara umum ada empat kategori yang digunakan sebagai alasan kegagalan implementasi, yaitu:

1. kurangnya pengetahuan tentang hukum dan hal yang diperlukan olehnya. Maksudnya adalah seberapa banyak pengetahuan yang dimiliki petugas akan berpengaruh nantinya dalam implementasi kebijakan, misalnya pengetahuan dan pemahamannya terhadap undang-undang yang akan digunakan dan bagaimana ia mengkomunikasikan nantinya.
2. kurangnya kapasitas yang memadai. Apakah lembaga memiliki kapasitas untuk melaksanakan beberapa bagian dari hukum tergantung dari sumber daya yang dibutuhkan.
3. Kurangnya motivasi dan insentif sebagai pendukung kinerja SDM dalam menjalankan tugasnya. Motivasi dan kemauan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan baik akan menjadi subjek dari karya-karya teoritis dan umumnya disebutkan atau berspekulasi dalam studi kasus implementasi.
4. Karena masalah yang terkandung dalam kebijakan itu sendiri.

Elmore *and* Berman (dalam Schneider, 2016), menyebutkan bahwa pada bagian bawah hierarki partisipasi lembaga sangat dibutuhkan. Lembaga pelaksana harus dapat mempelajari kebijakan baru, membentuknya, dan mengkalimnya sendiri. Bagaimana lembaga beroperasi dalam tugasnya sehingga kebijakan yang dibuat dapat menyelesaikan masalah yang ada. Namun implementasi kebijakan juga akan mengalami kegagalan apabila kebijakan yang dibuat mengandung ambiguitas sehingga memunculkan beberapa interpretasi seperti bertentangan dengan hukum dan mengandung kontradiksi internal.

Dalam mengidentifikasi aspek-aspek praktik agensi yang menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan sering kali yang

menjadi penyebabnya adalah kesulitan utama petugas memprediksi efek negatif yang akan terjadi. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi perlu dilakukan identifikasi terhadap titik lemah dalam sistem dan meminta beberapa bukti informasi dari informan.

2.3.9 Standar Perbandingan

Pada studi implementasi diterapkan standar yang digunakan untuk menilai kinerja system yang mengacu pada tugas dan kegiatan itu sendiri, dibandingkan dengan hasil yang diperoleh dari tugas-tugas tersebut. Dalam studi implementasi, praktik keagenan sering dibandingkan dengan cetak biru legislatif yaitu berupa arahan, aturan, dan standar kuantitatifnya untuk prosedur operasi yang digunakan untuk menilai apakah lembaga tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan. Hasil dari studi semacam ini dimaknai jika hukum mengandung larangan yang mutlak atau memiliki persyaratan yang mutlak dan pembuat kebijakan memiliki gagasan yang jelas dan konsensual tentang apa yang diterima dan apa yang tidak dapat diterima. Jika tidak demikian, mustahil bagi mereka untuk dapat menafsirkan data yang sedemikian rupa sehingga sulit menentukan langkah korektif seperti apa yang harus diambil.

Terlepas dari masalah interpretasi, studi implementasi kebijakan juga harus mencakup perbandingan praktik keagenan melawan arahan legislatif. Pembuat kebijakan harus memiliki kejelasan ide yang relatif sama tentang apa yang 'dapat diterima' dan informasi mengenai kinerja agensi selama memulai dan menyelesaikan fase implementasi. Hal tersebut menjadi kemampuan yang penting untuk meningkatkan kinerja agensi. Tetapi yang perlu ditekankan

adalah bukan peran penilai untuk menentukan apakah tingkat kinerja tertentu dapat diterima.

Peran penilai adalah menyediakan data yang dapat digunakan pada tingkat kinerja aktual dan jika memungkinkan sekaligus memberikan standar yang relevan terhadap tingkat kinerja yang bisa dinilai. Perbandingan dengan cetak biru legislatif harus dilakukan sehingga interpretasi akan lebih bermakna jika standar perbandingan yang digunakan tidak sewenang-wenang digunakan. Pendekatan umumnya yaitu dengan membandingkan tingkat kinerja agensi operasi bawah kebijakan baru dengan tingkat kinerja dibawah kebijakan lama.

Standar perbandingan selanjutnya adalah dengan menyandingkan kinerja agensi dibawah satu kebijakan dengan kinerja agensi yang jenisnya sama dibawah kebijakan yang berbeda. Perbandingan seperti itu dapat membantu pembuat kebijakan apakah tingkat kinerjanya sudah cukup baik dengan memberikan indikasi dari apa yang dialami di daerah lain. Strategi lain yang dapat digunakan dalam studi implementasi adalah dengan berkonsentrasi apakah dan bagaimana kinerja dapat ditingkatkan.

Karakter dari pendekatan ini adalah pemahaman bahwa keputusan apakah diterima atau tidaknya tingkat kinerja tidak bergantung pada nilai-nilai yang dipegang oleh pembuat kebijakan, tetapi bergantung pada sikap mereka dalam menyadari cara untuk memperbaiki system melalui amandemen, aturan administratif, alokasi, pelatihan, dan sebagainya.

Dari uraian mengenai standar perbandingan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa ada empat cara

mengevaluasi apakah kinerja suatu lembaga dalam halnya kegiatan, tugas, dan prosedur operasional dapat dikatakan sudah cukup baik, yaitu dengan cara:

1. Membandingkan praktik lembaga dengan cetak biru legislatif dan terhadap standar kuantitatif apapun yang termasuk didalamnya.
2. Membandingkan praktik keagenan dibawah undang-undang baru dengan praktik keagenan dibawah undang-undang lama untuk menentukan apakah tingkat kinerja lebih baik dari sebelumnya.
3. Membandingkan kinerja dengan yang ditemukan di daerah atau negara lain yang memiliki kebijakan yang berbeda.
4. Tidak menekankan terhadap masalah apakah kinerja itu cukup baik atau bahkan lebih baik dari sebelumnya, tetapi lebih berfokus pada bagaimana kinerja dapat ditingkatkan.

2.4 Tinjauan Tentang *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Sustainable Development Goals atau yang disingkat SDGs berawal dari hasil konferensi yang berjudul “*The Future We Want*”, merupakan konsep pembangunan berkelanjutan yang muncul dalam Konferensi Janeiro (Rio+20) yang diselenggarakan di Brazil, pada Bulan Juni 2012. Kemudian pada tanggal 25 September 2015 sebanyak 193 negara mendeklarasikan dan menyepakati target dan tujuan SDGs yang didalamnya memuat pula dimensi *Millenium Development Goals* (MDGs) yang menekankan pada pengentasan kemiskinan.

SDGs bertumpu pada tiga pilar yaitu, *Pertama* pilar sosial. Dalam pilar sosial terdiri atas pemerataan, kesehatan, pendidikan, keamanan, perumahan, dan kependudukan. *Kedua* pilar ekonomi. Pada pilar ini

terdiri atas struktur ekonomi, pola konsumsi dan produksi. *Ketiga* pilar lingkungan. Pada pilar lingkungan terdiri atas atmosfer, tanah, pesisir dan laut, air bersih dan keanekaragaman hayati. Adapun pilar sosial yang kemudian disebut dengan pilar pembangunan sosial didalamnya terdapat beberapa komponen tujuan yaitu, tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, dan kesetaraan gender (Alisjahbana, A. S., 2018)

Ketiga pilar yang menjadi tumpuan SDGs selanjutnya ditopang oleh landasan institusi tata kelola yang bertumpu pada 17 tujuan, diantaranya adalah mengakhiri kemiskinan, mengakhiri kelaparan, menjamin kehidupan yang sehat dan sejahtera, menjamin kualitas pendidikan, mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan, menjamin ketersediaan dan manajemen air, menjamin akses energi yang terjangkau, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membangun infrastruktur tangguh, mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara, membuat kota dan pemukiman yang adil, menjamin pola produksi dan konsumsi, memerangi perubahan iklim dan dampaknya, melestarikan samudera, laut dan sumber daya kelautan, meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai, memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global (Badan Pusat Statistik, 2020).

Dari ketujuh belas tujuan SDGs termasuk didalamnya terdapat 169 target-sasaran, dan 241 indikator yang saling mempengaruhi SDGs termasuk didalamnya adalah target dan tujuan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendidikan berkualitas. Target keempat dari SDGs adalah menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua. Salah satu target indikator yang akan dicapai oleh tujuan keempat SDGs adalah angka kelulusan sekolah menengah untuk anak laki-laki dan perempuan. Indikator ini

digunakan untuk melihat presentase anak laki-laki dan perempuan yang masuk kelas pertama sekolah menengah setelah menyelesaikan pendidikan sekolah dasar. Indikator ini digunakan untuk menangkap angka putus sekolah selama Sekolah Dasar dan selama transisi dari Sekolah Dasar menuju sekolah menengah. Angka kelulusan sekolah menengah perlu diketahui karena angka putus sekolah tertinggi berada pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sebab pada usia tersebut, biaya aktual dan biaya pendidikan menjadi lebih tinggi (Sutopo dkk, 2014)

Dalam dokumen hasil Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, inti sari dari SDGs adalah sebuah komitmen bersama yang jauh lebih komprehensif bila dibandingkan dengan MDGs. Target yang disepakati dalam SDGs juga lebih ambisius dan serius. Misalnya target kemiskinan dalam MDGs hanya berupa pengurangan jumlah kemiskinan, tetapi dalam SDGs target yang ingin dicapai sampai pada ingin menghilangkan kemiskinan dalam segala bentuknya (Hadiwijoyo dkk., 2019).

Salah satu upaya yang digunakan dalam pengentasan kemiskinan ialah melalui perlindungan sosial. Bantuan dan perlindungan sosial merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang bersifat pemenuhan hak dasar utama individu dan rumah tangga miskin. Hak dasar tersebut meliputi pendidikan, pangan, pelayanan kesehatan, sanitasi, dan air bersih. Program perlindungan sosial yang ada di Indonesia diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan lainnya (Sutopo dkk., 2014).

Dalam konteks nasional, SDGs kemudian diratifikasi di Indonesia dengan istilah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang selanjutnya

didukung dengan diberlakukannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Berdasarkan Perpres tersebut perlu adanya aksi pengarusutamaan dalam semua kebijakan dan program pemerintah mulai dari tingkat nasional sampai level desa. Desa merupakan ruang yang memiliki kompleksitas persoalan sosial-ekonomi (Iskandar, 2020).

2.5 Peran Kebijakan Graduasi dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Sejalan dengan isu pembangunan berkelanjutan pada lingkup global yang dikenal dengan istilah *Sustainable Development Goals* (SDGs), dimana salah satu tujuan yang terkandung didalamnya ialah menghapuskan kemiskinan dalam bentuk apapun dan dimanapun, pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya yang dibuktikan dengan pengesahan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Berbagai kebijakan pun dibuat untuk mendukung terwujudnya tujuan-tujuan SDGs di Indonesia.

Kebijakan publik yang pro kesejahteraan (*welfare policy*) atau disebut kebijakan sosial, yang berfokus pada perlindungan sosial (*social protection*) yang melembaga dan berkelanjutan juga sudah diimplementasikan. Menurut Suharto (2006) kebijakan sosial merupakan salah satu bentuk dari kebijakan publik. Kebijakan sosial adalah ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi masyarakat banyak serta fungsi kebijakan sosial diantaranya yaitu, fungsi preventif (pencegahan), fungsi kuratif (penyembuhan), dan fungsi pengembangan (*development*) (Suharto, 2006). Kebijakan sosial sejatinya memang kebijakan pemerintah yang melibatkan program-program perlindungan sosial bagi

kelompok-kelompok kurang beruntung. Di Indonesia sendiri PKH merupakan salah satu program perlindungan sosial yang terbukti dapat mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Wujud kesejahteraan peserta PKH ditandai dengan keputusan KPM melakukan graduasi.

Graduasi secara umum disebut dengan akhir dari PKH. Peserta yang memilih untuk menggraduasikan dirinya sebagai anggota PKH, secara tidak langsung turut berperan dalam mewujudkan salah satu fungsi kebijakan sosial, yaitu fungsi pengembangan (*development*) terhadap upaya kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui pembangunan pedesaan. Aggrawal (dalam Meutia Dkk, 2021) pembangunan pedesaan akan menguntungkan bagi penduduk desa dan mampu mengangkat standar hidup penduduk dalam jangka panjang dan berkelanjutan. Dalam pembangunan pedesaan biasanya melalui kegiatan kewirausahaan agar dapat meningkatkan kegiatan ekonomi pedesaan. Oleh sebab itu, baik PKH maupun graduasi diharapkan dapat memberikan sumbangsih harapan untuk lebih optimis mencapai tujuan pertama dan keempat SDGs yaitu menghilangkan bentuk kemiskinan dan menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua.

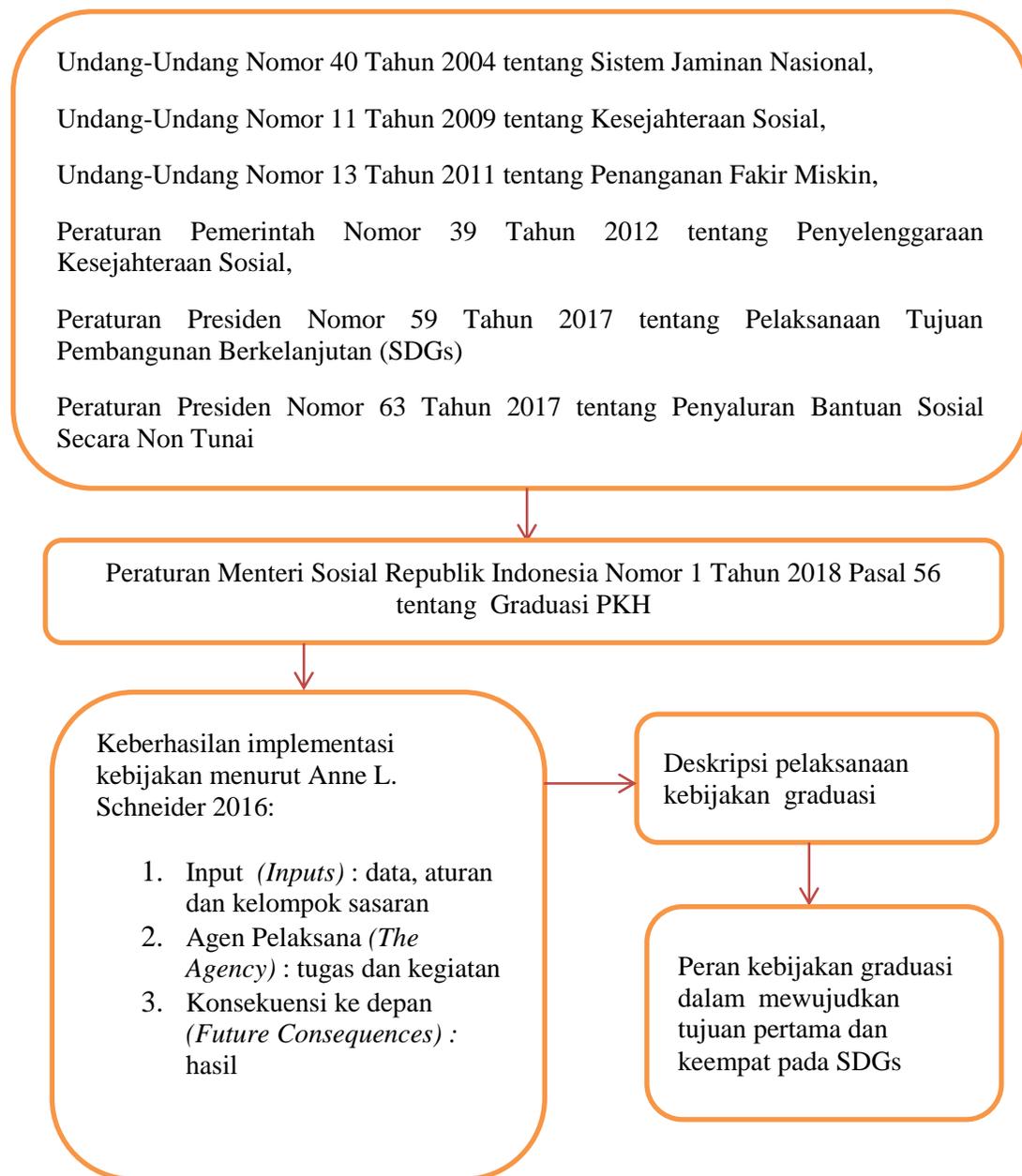
2.6 Kerangka Pikir

Kebijakan graduasi merupakan kebijakan yang dibuat untuk membimbing masyarakat khususnya peserta PKH agar mampu mengatasi masalah perekonomian dan kebutuhan dasarnya serta menjadikan peserta PKH tidak bergantung terhadap bantuan PKH yang diberikan pemerintah. Selain itu, implementasi kebijakan graduasi dapat mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan atau pada skala internasional dikenal dengan istilah *Sustainable Development Goals* (SDGs) khususnya

pada tujuan pertamanya yaitu menghapuskan kemiskinan dimanapun dan dalam bentuk apapun pada tahun 2030.

Kebijakan graduasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai dan merujuk pada Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 56 Tentang Graduasi PKH.

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk dapat memahami bagaimana implementasi kebijakan graduasi di Desa Gedung Jaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan dalam mewujudkan SDGs yaitu dengan teori keberhasilan implementasi kebijakan menurut Anne L. Schneider (2016), yaitu Input (sumber daya, aturan, klien), Agen Pelaksana (tugas, operasi, kegiatan, mengarahkan, keluaran), Konsekuensi dimasa depan (hasil). Adapun indikator yang digunakan untuk melihat Peran Kebijakan Graduasi Dalam Mewujudkan SDGs dilihat dari perubahan ekonomi yang dirasakan eks KPM pasca melakukan graduasi serta angka kelulusan sekolah anak pada tingkat pendidikan sekolah menengah untuk anak laki-laki dan perempuan. Kerangka fikir yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 4. Kerangka Pikir.

Sumber: Diolah Peneliti 2021

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan berbasis studi kasus (*case studies*). Menurut Slamet (2019), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengungkap hal-hal yang ultra empiris dengan menyajikan hasil penelitiannya berupa narasi atau kata-kata yang memberikan deskripsi mengenai fenomena yang diteliti. Basis penelitian studi kasus ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yaitu pendapat, perasaan, pengalaman, pengetahuan dan alasan yang kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi tentang Implementasi Kebijakan Graduasi Dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* yang didapat dari sejumlah individu atau kelompok PKH di Desa Gedung Jaya yang memilih graduasi mandiri.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Secara umum dalam penelitian deskriptif, peneliti mendeskripsikan indikator-indikator dan variable yang menjadi pusat perhatian penelitian. Sehingga dapat menguraikan fakta-fakta dan penjelasan menurut para informan, sesuai dengan pertanyaan saat wawancara yang dilakukan oleh peneliti, kemudian oleh peneliti dilakukan analisis untuk melihat apa yang melatar belakangi perilaku informan lalu direduksi, ditriangulasi, dan disimpulkan oleh peneliti serta dilakukan verifikasi. Penelitian studi kasus adalah analisis yang intensif tentang satu satuan yang menekankan faktor-faktor perkembangan dalam hubungannya dengan konteks.

Feagin Orum *and* Sjoberg (dalam Rahardjo, 2017) menyatakan bahwa studi kasus adalah sebuah metodologi yang ideal apabila sebuah penelitian yang menyeluruh (holistik) dan mendalam diperlukan. Yin (dalam Rahardjo, 2017) menyatakan bahwa studi kasus adalah penelitian mengenai kekhasan dan kompleksitas kasus tunggal, mengarah pada pemahaman mengenai kasus itu dalam keadaan-keadaan yang penting.

Menurut Rahardjo (2017) penelitian studi kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara instensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Biasanya, peristiwa yang dipilih yang selanjutnya disebut kasus adalah hal aktual (*real-life events*), yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah lewat. Ciri penelitian studi kasus dari sisi wilayah kajiannya adalah studi kasus terbatas pada wilayah yang sempit (mikro), karena mengkaji perilaku pada tingkat individu, kelompok, lembaga dan organisasi. Kasusnya pun dibatasi pada jenis kasus tertentu, di tempat tertentu, dan dalam waktu tertentu.

3.2 Fokus Penelitian

Sugiyono (2016) menyebutkan bahwa batasan masalah penelitian kualitatif disebut dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Dengan demikian, dalam penelitian kualitatif hal yang harus diperhatikan adalah masalah dan fokus penelitian, karena untuk memberikan batasan penelitian yang seharusnya diteliti dan mendapatkan data sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut. Penentuan fokus penelitian didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari lapangan.

Fokus penelitian yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan graduasi dalam mewujudkan SDGs di Desa Gedung Jaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan dengan menggunakan teori keberhasilan implementasi kebijakan menurut Anne L. Scheneider (2016), dilihat dari beberapa aspek didalamnya, yaitu:
 - a. Input (data, aturan, kelompok sasaran)
 - b. Agen Pelaksana (tugas dan kegiatan)
 - c. Konsekuensi dimasa depan (hasil implementasi)
2. Mengidentifikasi peran kebijakan graduasi dalam upaya mewujudkan SDGs di Desa Gedung Jaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waykanan, yaitu:

Tujuan pertama: mengakhiri segala bentuk kemiskinan berdasarkan perubahan ekonomi (peningkatan pendapatan dan kepemilikan usaha pada eks KPM PKH)

Tujuan keempat : menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua berdasarkan indikator angka kelulusan sekolah menengah untuk anak laki-laki dan anak perempuan

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dilakukannya proses penelitian. Pada penelitian ini lokasi penelitian dilakukan di Desa Gedung Jaya Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan. Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini adalah ditengah permasalahan ketidaktepatan sasaran penerima Program Keluarga Harapan, Desa Gedung Jaya yang letak geografisnya cukup jauh dari pusat pemerintahan, namun berhasil mencatatkan diri sebagai desa yang turut andil dalam pelaksanaan

graduasi, yang mana graduasi tersebut dimaksudkan untuk ketepatan sasaran bantuan. Hal ini ditandai dengan adanya Tujuh KPM yang mau melakukan graduasi mandiri di tahun 2021. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui proses pelaksanaan graduasi dan peran graduasi itu sendiri dalam mewujudkan cita-cita SDGs untuk mengentaskan kemiskinan di Desa Gedung Jaya Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan.

3.4 Sumber Data

3.4.1 Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian melalui wawancara secara langsung dan terbuka terhadap informan yang berkompeten sesuai dengan keperluan data. Data primer dapat berupa opini subjek baik secara individu atau kelompok. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer ialah *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan dalam menentukan informan (Sugiyono, 2016). Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan informan yang telah tentukan dengan menggunakan pedoman wawancara untuk mendapatkan deskripsi terkait Implementasi Kebijakan Graduasi Dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada Kelompok PKH Desa Gedung Jaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way kanan.

3.4.2 Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku atau literatur yang berhubungan dengan pembahasan dan penelitian yang berdasarkan data penunjang lain yang berkaitan dengan

permasalahan yang diteliti. Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Data sekunder yang peneliti dapatkan dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari informan dan responden. Informan adalah orang yang benar-benar memahami permasalahan yang sedang diteliti. Sedangkan responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal melalui proses wawancara. Pada penelitian ini data sekunder didapat dari pihak kelompok PKH dan Pendamping PKH Desa Gedung Jaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2016), menyatakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

3.5.1 Observasi

Observasi adalah mengadakan penelitian langsung dengan cara pengamatan kepada objek penelitian untuk memperoleh data-data informatika yang akurat. Menurut Slamet (2019), teknik observasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat nonverbal dimana peneliti bukan semata-mata menggunakan penglihatan melainkan dapat juga menggunakan indera lainnya seperti pendengaran, penciuman, rasa, dan rabaan.

Observasi umumnya dilakukan diawal kegiatan survey yang dapat dijalankan bersama dengan studi dokumen atau eksperimen. Ada dua tipe observasi, yaitu observasi berpartisipasi dan observasi tidak berpartisipasi. Observasi partisipatif adalah cara pengamatan dimana peneliti benar-benar berpartisipasi dalam kejadian-kejadian yang sedang diteliti. Adapun data yang penulis peroleh dari observasi ini adalah bagaimana implementasi kebijakan graduasi di Desa Gedung Jaya dan apakah peranan dari graduasi itu sendiri untuk menyokong terwujudnya tujuan pertama dari SDGs.

3.5.2 Wawancara

Slamet (2019), mengatakan bahwa teknik wawancara dimaksudkan untuk memperoleh informasi melalui kegiatan interaksi sosial antara peneliti dengan informan penelitian mengenai apa yang dipikirkan, diyakini dan dirasakan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Melalui wawancara peneliti bermaksud dapat mengungkap mengenai pokok permasalahan yang sedang diteliti.

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara langsung dengan alat bantu daftar pertanyaan yang bersifat terbuka. Teknik tersebut dilakukan dengan cara Tanya jawab antara peneliti dengan beberapa narasumber yang dianggap telah memenuhi atau relevan dengan penelitian ini. Wawancara yang dilakukan secara terbuka serta mendalam agar dapat memberikan kesempatan nara sumber agar menjawab secara bebas. Selain itu pada saat proses wawancara peneliti juga melakukan beberapa cara untuk melengkapi wawancara namun tetap berdasarkan pedoman wawancara.

Pada umumnya teknik wawancara dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Wawancara terstruktur (*fully-structured interview*) yaitu suatu wawancara dimana seperangkat pertanyaan-pertanyaan yang akan diwawancarakan telah disusun dengan urutan dari awal hingga akhir. Pewawancara tidak melakukan variasi pertanyaan melainkan berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.
- b. Wawancara semi terstruktur (*semi-structured interview*) yaitu tipe wawancara yang sebelumnya juga menyusun seperangkat pertanyaan tetapi peneliti memiliki fleksibilitas menambahkan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan atas respon *interviewer*.

Tabel 4. Daftar Informan

No	Jabatan	Informan	Informasi
1.	Pendamping PKH Desa Gedung Jaya	Aan Muslihin	Peranan pendamping dalam pelaksanaan PKH hingga graduasi di Desa Gedung Jaya
2.	Kepala Desa Gedung Jaya	Ketut Namayasa	Pelaksanaan PKH di Desa Gedung Jaya.
3.	Eks Peserta PKH Desa Gedung Jaya	-Septiana -Kustati	Faktor yang mempengaruhi keputusannya menjalankan kebijakan graduasi dan Dampak sosial ekonomi KPM PKH <i>exit</i> mandiri di Desa Gedung Jaya.

Sumber: Diolah Peneliti (2021)

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu penyelidikan yang menggunakan sumber-sumber dokumentasi untuk mendapatkan data yang diperlukan (Sari, 2020). Adapun data yang penulis peroleh dari dokumentasi ini adalah data KPM PKH secara menyeluruh, KPM aktif dan KPM yang telah graduasi pada kelompok PKH Desa Gedung Jaya.

Tabel 5. Dokumen Penelitian

No.	Dokumen	Keterangan
1.	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.	Berisi tinjauan tentang Program Keluarga Harapan (PKH)
2.	Data Laporan Badan Pusat Statistik 2020	Berisi tentang presentase penduduk miskin Provinsi Lampung per Kabupaten/Kota
3.	Pedoman Pelaksanaan PKH 2020	Berisi tinjauan tentang pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)
4.	Strategi Menggraduasi PKH	Berisi tinjauan tentang pelaksanaan graduasi KPM PKH
5.	Kajian Indikator <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i> Badan Pusat Statistik 2020	Berisi tinjauan tentang indikator-indikator yang ada didalam SDGs
6.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Konsep, Target, Dan Strategi Implementasi	Berisi uraian implementasi SDGs di Indonesia
7.	<i>Studying Policy Implementation A Conceptual Framework</i>	Berisi tinjauan tentang implementasi kebijakan sosial
8.	Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan <i>Good Governance</i>	Berisi tinjauan tentang kajian konsep, teori dan fakta dalam Ilmu Administrasi Negara

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2020

3.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian berbasis studi kasus yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, maka teknis analisis datanya disajikan dalam bentuk paparan atau gambaran dari temuan-temuan dilapangan baik berupa data dan informasi hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Miles *and* Huberman (dalam Anggito dkk, 2018) beranggapan bahwa analisis terdiri dari tiga alur kegiatan. Penjelasan terkait alur kegiatan yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

3.6.1 Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan penelitian pada penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis dari lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan dapat ditarik.

3.6.2 Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun berdasarkan data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian, yang memberi kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan.

3.6.3 Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan merupakan bagian satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Makna-makna yang muncul dari data harus di uji kebenarannya, kekokohan dan kecocokannya. Setelah melakukan pengujian kebenaran, kemudian penulis menarik kesimpulan berdasarkan data tersebut. Kesimpulan juga diverifikasi sebagai hasil analisis data.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Untuk menentukan keabsahan atau validitas data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi persyaratan. Menurut Slamet (2019), ada dua cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh derajat validitas yang meyakinkan, yaitu:

3.7.1 Triangulasi

Konsep triangulasi menentukan bahwa peneliti menggunakan berbagai metode, sumber data, peneliti dan teori untuk mengumpulkan dan menganalisis data sehingga semua sumber sesuai dengan fakta-fakta dari sebuah kasus. Ini artinya berbagai jenis sumber data dan berbagai data dan berbagai informasi dari berbagai responden harus dimasukkan kedalam rancangan penelitian termasuk wawancara, *focus grup discussion*, catatan lapangan, dokumen, data sekunder, pengamatan dan bahkan data survey. Denzin (dalam Slamet, 2019) mengatakan bahwa triangulasi dapat menyelamatkan penelitian kualitatif dari berbagai bias dan kekurangan yang bersumber dari pengendalian sumber data, peneliti, teori, dan metode yang tunggal. Oleh karena itu ia mengidentifikasi empat jenis triangulasi, yaitu:

- a. Triangulasi data, disebut juga triangulasi sumber. Apabila peneliti mencari data dengan menggunakan berbagai sumber data didalam penelitiannya.
- b. Triangulasi peneliti, apabila beberapa peneliti menguji fenomena yang sama, membicarakan atau mendiskusikan bersama-sama temuan mereka, dan kemudian memiliki kesimpulan yang sama atas kajian fenomena yang bersama-sama mereka teliti.

- c. Triangulasi teori, apabila peneliti dengan sudut pandang atau landasan teoritik yang berbeda menafsirkan seperangkat data yang sama.
- d. Triangulasi metodologi, apabila peneliti menggunakan keanekaragaman metode penelitian untuk mempelajari suatu problem tunggal.

3.7.2 Melakukan Replikasi

Replikasi adalah melakukan penelitian ulang mengenai suatu masalah penelitian dengan menggunakan desain penelitian yang sama dengan sebelumnya guna membandingkan temuan-temuan berdasarkan variasi tempat dan waktu guna memperoleh generalisasi temuan. Dalam studi kasus, replikasi adalah kegiatan penelitian ulang yang dilakukan dengan metode dan teknik penelitian yang sama pada kasus yang berbeda atau ditempat yang berbeda untuk melihat apakah ada persamaan temuan penelitian dari berbagai kasus yang diteliti.

Berdasarkan penjelasan tentang cara memperoleh derajat validitas yang meyakinkan menurut Slamet (2019), dapat disimpulkan bahwa dalam menguji keabsahan data peneliti dapat menggunakan salah satu cara yang menurutnya paling efektif untuk diterapkan dalam penelitiannya. Sebab itu, untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini, penulis mencoba menggunakan teknik triangulasi yang kemudian di spesifikkan pada teknik triangulasi metode karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan sejumlah metode pengumpulan data seperti observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan graduasi di Desa Gedung Jaya telah berjalan dengan baik. Secara prosedural pelaksanaan Program Keluarga Harapan dan kebijakan graduasi di Desa Gedung Jaya pun telah berjalan dengan semestinya. Pada saat akan dilaksanakan graduasi PKH, pendamping PKH akan melakukan verifikasi data. Data yang digunakan merupakan hasil dari pemutakhiran data reguler dan pemutakhiran data sosial ekonomi KPM PKH Desa Gedung Jaya. Kebijakan graduasi merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 56 tentang Graduasi PKH. Sedangkan pada saat pelaksanaan kebijakan graduasi di Desa Gedung Jaya, pendamping PKH merujuk pada Petunjuk Teknis Graduasi Keluarga Penerima Manfaat Tahun 2021. Atas dasar hasil pemutakhiran data sesuai dengan peraturan dan petunjuk teknis yang ada, pendamping PKH dapat menentukan kelompok sasaran. Pada tahap ini akan muncul 2 kelompok, yaitu kelompok transisi dan kelompok graduasi.

Dalam pelaksanaan PKH sampai dengan graduasi, pendamping PKH memiliki peran sebagai fasilitator, mediator, advokator, edukator, dan motivator bagi KPM yang didampinginya. Sedangkan tugas dan kegiatan pendamping PKH dalam graduasi dimulai dengan melakukan analisis terhadap calon KPM yang akan digraduasi sampai dengan melakukan pendekatan profesional terhadap KPM tersebut agar pada saat

ekonominya sudah sejahtera, KPM tidak sungkan untuk melakukan graduasi. Hasil pelaksanaan graduasi di Desa Gedung Jaya ditandai dengan adanya 14 KPM yang tergraduasi alami dan 7 KPM yang memutuskan untuk graduasi mandiri.

Pelaksanaan PKH dan graduasi di Desa Gedung Jaya telah memberikan dampak positif pada ekonomi eks KPM PKH berupa kecukupan atas kebutuhan dasar KPM serta peningkatan pendapatan keluarga KPM dari hasil usaha sebesar 15-20% dari pendapatan sebelumnya. Eks KPM PKH pun kini telah memiliki usaha kecil yang dirintis namun telah berjalan lancar. Peningkatan pendapatan eks KPM tidak sepenuhnya diperoleh dari bantuan PKH, namun terdapat bukti pemberdayaan dalam PKH mengenai pengelolaan keuangan keluarga sehingga dapat menuntun KPM untuk dapat mengelola penghasilan keluarga dan bantuan PKH dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi dalam jangkauan yang lebih luas, pelaksanaan PKH dan graduasi di Desa Gedung Jaya dapat dikatakan belum memenuhi target tujuan keempat SDGs. Hal ini dibuktikan dengan masih ada angka putus sekolah anak PKH ke jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu memberikan penghargaan kepada KPM PKH yang mau graduasi mandiri dengan diberikan *reward* berupa suntikan modal stimulant untuk mengembangkan usaha yang dimiliki eks KPM agar nantinya mereka akan benar-benar terlepas dari kemiskinan. Permodalan usaha dapat melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai program lanjutan dari program bantuan sosial

menjadi kemandirian usaha yang menasar pada usaha mikro yang berada di lapisan terbawah.

2. Untuk meminimalisir angka putus sekolah pada anak PKH di Desa Gedung Jaya, sebaiknya pendamping PKH dapat memberikan perhatian lebih pada masalah ini. Sebab jika dibiarkan tujuan PKH untuk memutus rantai kemiskinan pada generasi muda akan sulit dicapai. Oleh karena itu, pendamping PKH Desa Gedung Jaya perlu meningkatkan perannya sebagai educator dan motivator agar dapat memberikan pengetahuan dan wawasan lebih terkait informasi pendidikan serta memberikan motivasi dan mendorong KPM untuk mendukung anak-anaknya dalam melanjutkan pendidikan.
3. Untuk peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian semacam ini dengan dengan mengaitkan tujuan-tujuan pada SDGs, seperti tujuan nomor 2, nomor 3, dan nomor 5, dimana tujuan-tujuan tersebut masuk kedalam ranah pilar sosial sehingga sangat cocok dikaitkan dengan bantuan program perlindungan sosial seperti PKH. karena bahasan mengenai PKH dan graduasi sangatlah luas dan beragam terlebih jika dikaitkan dengan SDGs, oleh sebab itu memberi kesempatan kepada peneliti selanjutnya untuk memperdalam penelitiannya tentang topik-topik tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Agustino, Leo. (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Anggara, Sahya. (2016). *Ilmu Administrasi Negara (Kajian Konsep, Teori, dan Fakta Dalam Upaya Menciptakan Good Governance)*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Anggara, Sahya. (2018). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Anggito, Albi dan Setiawan, Johan.(2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak
- Budiman Rusli. (2016). *Kebijakan publik*. Hakim Publishing.
- Hadiwijoyo, S. Sakti dan Anisa, D. Fahima. (2019). *SDGs Paradigma Pembangunan Global*. Yogyakarta: Spektrum Nusantara
- Iskandar, A. Halim. (2020). *SDGs Desa (Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Meutia, Intan Fitri. (2013). *Analisis Kebijakan Publik*. CV. Anugrah Utama Raharja. <http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/18950>
- Slamet, Yulius. (2019). *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiyono. (2016). *Metode Peneletian: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Skripsi, Jurnal dan Modul :

- Aini, Nurul. (2018). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pemberdayaan Masyarakat. UIN Raden Intan, Lampung, 22–24.*
- Alisjahbana, A. S., & Murniningtyas. (2018). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia (konsep target dan strategi implementasi).* UNPAD Press.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Statistik Indonesia Dalam Infografis 2019. Data Badan Pusat Statistik, 1103024, 21–22.*
- Bappenas. (2019). *Strategi Graduasi KPM PKH (pp. 22–24).* BAPENAS.
- Iis Arfiyani, TJ Raharjo, A. Y. (2020). *Family Development Session Sebagai Upaya Peningkatan Keterampilan Hidup Masyarakat Miskin.* 9(1), 58. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v9i1.24517>
- Kementerian Sosial RI. (2020). *Panduan pelaksanaan PKH 2020.pdf (pp. 3–14).* Kementerian Sosial.
- Kementerian Sosial. (2021). *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021.* In *Kementerian Sosial Republik Indonesia* (p. 76).
- Khoiriyah, Nur & Kunanti. (2019). *Graduasi Mandiri Bentuk Keberdayaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH).* 10(2), 143–156. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i2.1216>
- Meutia Dkk. (2021). *Fostering entrepreneurial ecosystem within rural entrepreneurship.* *International Journal of Entrepreneurship*, 25(3), 1–10. <https://bit.ly/3bRX9of>
- Panuluh, S., & Fitri, M. R. (2016). *Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia September 2015-September 2016.* *September 2015*, 1–25. <https://www.infid.org/>
- Permana C.A, DKK. (2018). *Program Keluarga Harapan Untuk Memutus Rantai Kemiskinan Di Kota Malang (Studi di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang).* *Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang P a.* 10(2), 64–74. <https://doi.org/10.52166/madani.v10i2.1054>

- Rahardjo, M. (2017). *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*. Universitas Islam Negeri, Malang.
- Sari, Ainun Oktavia. (2020). *Dampak Sosial Ekonomi Pada Keluarga Penerima Manfaat (Kpm) Program Keluarga Harapan (PKH) Exit Mandiri Di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Dalam Perspektif The Most Significant Change Technique (MSCt)*. Universitas Lampung.
<https://doi.org/10.23960/administrativa.v2i3.51>
- Schneider, A.L. (2016). *Studying Implementation (A Conceptual Framework)*. Institute of Policy Analysis.
<https://doi.org/10.1177/0193841X8200600601>
- Setiawan, D. (2020). *Kewirausahaan Sosial Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Graduasi*. Puslitbang Kementerian Sosial RI.
- Suharto, E. (2006). *Kebijakan Sosial*. 1–18.
- Sutopo, Agus, DKK. (2014). Kajian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs). *Badan Pusat Statistik*, 23–25.
- Wulandari dkk. (2013). *Analisis Ketepatan Sasaran Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Berdasarkan Karakteristik Perumahan dan Demografis Rumah Tangga Dharmesti Wulandari*.
<http://www.lib.ui.ac.id/naskahringkas/2016-03/S45842-Dharmesti>
Wulandari
- Yulianti, Devi.(2018). *Implementasi Program Kemitraan Dalam Corporate Social Responsibility (CSR) Melalui Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mewujudkan Pembangunan Kesejahteraan*.
<https://doi.org/10.23960/jurnal%20sosiologi.v20i1.14>

Dokumen :

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Nasional.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 56 Tentang Program Graduasi

Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Nasional Nomor: 03/3/BS.02.01/10/2020 Tentang Petunjuk Teknis Graduasi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan.

Sumber Lainnya:

Badan Pusat Statistik.(2020). *Presentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota 2019-2020*. Diakses di <https://www.bps.go.id/indicator/23/621/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota.html>. Pada tanggal 14 Januari 2021

Erik Handoko. (2020). *5.962 Penerima PKH Lampung Tergraduasi Sejahtera*. Kupastuntas.Co. Diakses di <https://kupastuntas.co/2020/01/23/5962-penerima-pkh-lampung-tergraduasi-sejahtera>. Pada tanggal 8 Desember 2020

Fikri. (2020). *48 KPM di Kecamatan Kasui mundur dari PKH, total Way Kanan 189 KPM Way Kanan*. Diakses di <https://www.lampungvisual.com/48-kpm-di-kecamatan-kasui-mundur-dari-pkh-total-way-kanan-189-kpm-way-kanan/>. Pada tanggal 10 Februari 2021

Kementrian Sosial RI. (2020). *Kemensos Fokuskan Empat Kebijakan PKH*. Diakses di <https://kemosos.go.id>. <https://kemosos.go.id/kemensos-fokuskan-empat-kebijakan-pkh>. Pada tanggal 8 Desember 2020

Kementrian Sosial RI. (2020). *Tabel Sebaran KPM dan SDM PKH Tahap 4*. Diakses di <https://pkh.kemensos.go.id/?pg=dashome>. Pada tanggal 14 Januari 2020

Rahmat. (2019). *Program PKH Bermanfaat Menurunkan Angka Kemiskinan di Kabupaten Way Kanan*. Diakses di <https://karyanasional.com/2019/12/12/program-pkh-bermanfaat-menurunkan-angka-kemiskinan-di-kabupaten-way-kanan/>. Pada tanggal 10 Feburi 2021